

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI OBJEK WISATA KERENG BANGKIRAI

Afinsa Leluni¹⁾*, **Syamsuri²⁾**, **Edward Melio Bertho³⁾**

^{1,2,3)} Prodi atau Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya, Indonesia

* afinsaleluni0808@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini digunakan karena merupakan metode yang efektif untuk peneliti memahami fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data secara apa adanya. Fokus penelitian ini diambil berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Model George C. Edward III. 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dilihat dari komunikasi yang sudah terpenuhi dengan baik, sumber daya di mana fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup memadai, disposisi sudah saling melengkapi dengan adanya pengangkatan birokrasi mereka tetap diberikan insentif, dan struktur birokrasi yang sudah terpenuhi dengan baik. Terdapat juga faktor pendukungnya seperti Peraturan Daerah (Perda), peran dan keterlibatan masyarakat setempat dan stakeholder lain, pos pusat informasi, adanya sosialisasi dan tersedianya wahana-wahana wisata yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak adanya pelatihan khusus untuk para karyawan, dan banyaknya pengunjung atau wisatawan yang kurang mengetahui terkait retribusi daerah.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; Retribusi; Sektor Pariwisata

PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri tentunya menuntut semua pihak harus berbenah diri dalam menghadapi tantangan sekaligus ancamannya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Peran pemerintah sebagai pihak penyelenggaraan negara harus sigap dalam merancang formulasi kebijakan yang dapat berimplikasi positif

pada struktur negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa tentunya sangat kaya akan potensi dan sumber daya, sehingga dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengembangkannya agar berdaya guna terhadap peningkatan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan berlakunya sebuah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, setiap daerah semakin dituntut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber penerima daerah. Sumber-sumber penerima daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 meliputi: (1) pendapatan asli daerah, (2) pendapatan transfer, (3) pendapatan daerah lainnya yang sah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan penerima daerah.

Salah satu sektor ekonomi yang akan menjadi sangat strategis di masa depan adalah pariwisata. Proses identifikasi dan perencanaan pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan secara lebih luas dan matang. Diharapkan pertumbuhan industri pariwisata akan mendukung pelestarian alam, kekayaan hayati, dan kekayaan budaya. Ketika pemanfaatan potensi sumber daya alam tidak optimal dan cenderung eksploitatif, muncul masalahnya. Pengembangan kawasan wisata dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati adalah cara terbaik untuk mengatasi kecenderungan ini.

Sektor pariwisata di Indonesia adalah sektor yang menjanjikan. Saat ini, sumber pendapatan asing terbesar di Indonesia adalah pariwisata, di urutan keempat setelah migas, gas, batu bara, dan minyak sawit. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata berusaha menempatkan pariwisata Indonesia di urutan ketiga puluh besar di dunia. Dengan mencapai target ini, Kementerian Pariwisata diharapkan memberikan kontribusi sebesar lima belas persen perekonomian nasional, menghasilkan tiga belas juta tenaga kerja dan dua ratus tujuh puluh lima triliun dolar AS.

Menurut Undang-undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan otoritas setempat. Pembangunan pariwisata tidak dapat dicapai hanya oleh satu partai politik saja, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 10 Tahun 2009 yang memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang indah ialah Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mempunyai luas 2.678,51 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 299.692 jiwa. Secara administratif Palangka Raya terbagi menjadi lima kecamatan dan 30 kelurahan. Dari segi pariwisata kota Palangka Raya memiliki 24 destinasi wisata yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu tujuh Daya Tarik Wisata (DTW) budaya, tiga DTW religi, dan 14 DTW alam yang sedang dalam pengembangan. Diantara sekian banyak destinasi Kereng Bangkirai menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan wisatawan di kota Palangka Raya. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 3.865 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 389.235 orang. Total kunjungan wisatawan di kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 393.100 orang.

Dermaga kereng bangkirai merupakan gerbang masuk menuju kawasan taman nasional sebangau, taman nasional sebangau merupakan kawasan wisata alam dan juga lokasi penelitian gambut di Kalimantan tengah. Dermaga kereng bangkirai dulunya merupakan tempat untuk berlatih atlet dayung di Kalimantan tengah. Kemudian dibangun tribun dan pondok-pondok kecil yang dibangun disekitar sungai sebangau, sekarang di sekitar dermaga kereng bangkirai sudah banyak terbangun warung maupun rumah warga. Wahana wisata yang ada di dermaga kereng bangkirai yaitu sepeda bebek air, susur sungai, wisata batu ampar, dan masih banyak lagi yang lain. Biaya untuk menggunakan wahana wisata pun tidak mahal sekitar 5.000-30.000 rupiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata di objek wisata kereng bangkirai dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata di objek wisata kereng bangkirai.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988), kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah publik atau pemerintah. Di sisi lain dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara permanen oleh pemerintah melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara menyeluruh (Amiri, Dengo, and Londa 2020).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan” kebijakan ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Kebijakan publik tidak diciptakan tanpa alasan atau tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menghadapi masalah yang muncul dalam masyarakat. Ada banyak jenis, variasi, dan tingkat masalah yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik dapat menghasilkan kebijakan publik. Hanya masalah yang mampu mendorong masyarakat untuk berpikir dan mencari solusi yang dapat menjadi kebijakan publik. Jadi, mendefinisikan masalah kebijakan publik adalah langkah penting dalam proses kebijakan publik. Namun, dalam proses ini, penting juga untuk mempertimbangkan siapa yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengesahkan, melaksanakan, serta memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan publik.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasi kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan kebijakan publik derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan. Kebijakan publik yang

bisa langsung di oprasionalkan antara lain keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok yang ditargetkan tercakup dalam kebijakan, jenis-jenis keuntungan yang diterima oleh kelompok tersebut, sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, apakah letak sebuah program sudah sesuai, apakah kebijakan tersebut telah mengidentifikasi pelaksana dengan jelas, dan apakah program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai (Entjaurau, Sumampow, and Undap 2021).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. hal ini sesuai dengan pandangan van meter dan horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*Policy Stakeholders*) (D et al. n.d.).

C. Kebijakan Retribusi dan Pariwisata

Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi. Retribusi ini termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Sasaran utama dari peningkatan retribusi pariwisata untuk meningkatkan pelayanan fasilitasi, tempat rekreasi. Untuk meningkatkan ketertiban pengunjung dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kebijakan retribusi merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah yang optimal, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Sebagian dana tersebut dikelola sendiri oleh daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya dapat

mencukupi kepentingan rumah tangganya sendiri. Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup akan dengan mudah menyelenggarakan urusan pemerintahannya dan kemakmuran masyarakatnya pun akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tercipta berkat ide dan gagasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan kebijakan retribusi sektor pariwisata, yakni penelitian dari Andi Iqra Syamsul Bahri tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bulukumba cukup berhasil dengan komunikasi dalam implementasi kebijakan pariwisata berjalan dengan mentransmisikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan sudah konsisten dalam melakukan komunikasi.

Penelitian kedua oleh Isnayanti tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Pantai Bira Kabupaten Bulukumba”. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata pantai bira kabupaten bulukumba dilihat dari komunikasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapat wisatawan atau sasaran kebijakan yang belum paham mengenai isi dari kebijakan retribusi ini selain itu masih ditemui wisatawan yang tidak dikenakan biaya retribusi saat memasuki pantai bira.

Penelitian ketiga oleh Annisa Fitri, Nursaadah Khudri², Maila Delvianti tahun 2022 dengan judul “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman”. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa, proses Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Objek Wisata Kota Pariaman berdasarkan Teori Edward dinilai sudah berhasil dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain

itu kebijakan ini juga penting dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman terutama meningkatkan PAD Kota Pariaman yang menurun selama pandemi Covid-19 serta Pemerintah Kota Pariaman sudah melakukan 5 inovasi dalam pengembangan objek wisata Kota Pariaman yaitu: Aplikasi SIPAMAN (Sistem Pariwisata Pariaman), STIB (Sekolah Tinggi Ilmu Beruk), Lomba Video Kreatif, Team Kreatif Media Promosi serta Event PCE (Pariaman Culture Everyweek).

Penelitian keempat oleh Graha Pandita tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)”, menghasilkan penelitian mengenai implementasi kebijakan pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, secara umum program dan kegiatan tahun 2014-2016 telah terealisasi dengan baik, walaupun ada beberapa program pengembangan tidak terimplementasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk kegiatan penelitian karena sangat membantu dalam menentukan jalan penelitian agar apa yang diteliti bermanfaat bagi instansi atau menghasilkan pengetahuan baru untuk kelangsungan instansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai dan untuk mengetahui faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai. Maka jenis penelitian yang tepat untuk digunakan adalah penelitian kualitatif, karena dapat menjelaskan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat serta sesuai dengan kondisi pelaksanaan Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai.

Penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang melibatkan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari awal penelitian hingga kesimpulannya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara rasional dan metodis,

yaitu dengan menyajikan situasi aktual yang terjadi pada objek penelitian apa adanya, menggunakan informasi peneliti dan informasi dari informan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisis menurut tujuan penelitian yang ingin diperoleh pada lokasi penelitian, berikut merupakan hasil penelitian dari data dan fakta yang ada di lapangan dengan perspektif legalistik dan teoritis yang akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis dan mengidentifikasi penerapan kebijakan retribusi sektor pariwisata di objek wisata Kereng Bangkirai. Dengan menggunakan teori George C. Edward III (1980) meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward III dalam Nugroho (2009) bahwa komunikasi merupakan indikator pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi yang dimaksud oleh Edward III adalah berhubungan dengan cara kebijakan publik disampaikan kepada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan. Komunikasi merupakan indikator kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika tidak ada komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Komunikasi tentunya sangat penting didalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata di Objek Wisata Kereng Bangkirai. Indikator komunikasi dalam teori George C. Edward III memiliki tiga sub indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi di antaranya, transmisi, kejelasan, dan konsistensi (ABADIE, ANGRIST, and IMBENS 1999).

2. Sumber Daya

Berdasarkan pendapat George C. Edward III, sumber daya adalah penggerak dan pelaksana. Sumber daya manusia menjadi faktor paling penting dalam mencapai kesuksesan pada proses pelaksanaan, sementara keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh pemakaian sumber daya manusia, biaya, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Sumber daya adalah elemen yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam teori George C. Edward III, indikator sumber daya terbagi menjadi dua sub indikator yang berpengaruh terhadap kebijakan, yaitu, sumber daya manusia (karyawan), sumber daya fasilitas (fasilitas sarana prasarana).

3. Disposisi

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C. Edward III, sikap atau disposisi dari pelaksana dianggap sebagai elemen kunci dalam pendekatan terhadap pelaksanaan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif terhadap suatu kebijakan, ada kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya dengan serius seperti yang diharapkan. Namun, jika ada perbedaan dalam cara pandang dan perilaku antara pelaksana dan pembuat kebijakan, maka proses implementasi dapat menghadapi berbagai tantangan.

4. Struktur Birokrasi

Indikator terakhir dari teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III adalah tentang struktur birokrasi. Ia berpendapat bahwa untuk meningkatkan kinerja struktur birokrasi dengan lebih baik, dapat dilakukan melalui SOP (Standart Operating Procedure) dan fragmentasi. Salah satu cara untuk menerapkan fragmentasi adalah dengan membagi tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pelaksana di antara beberapa unit kerja.

Birokrasi adalah struktur yang dibutuhkan dalam pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Struktur birokrasi memiliki dua sub indikator yang mempengaruhinya, yaitu Standart Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai, dengan ketersediaan lembaga ini, setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang khusus untuk Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata di Objek Wisata

Kereng Bangkirai. Karena dengan membuat tugas dan beban kerja yang jelas untuk setiap bagian, bagian lain lebih mudah melaksanakan tugasnya. Selain itu, membuat tindakan pejabat dalam organisasi menjadi konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Objek Wisata Kereng Bangkirai, ditemukan bahwa implementasi kebijakan retribusi sektor pariwisata dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu: komunikasi yang sudah berjalan optimal melalui penyebaran informasi via spanduk dan media sosial; sumber daya yang terdiri dari fasilitas yang memadai namun kurangnya pelatihan bagi karyawan; disposisi yang menunjukkan keterkaitan antara pengangkatan birokrasi dan kebutuhan pemberian insentif; serta struktur birokrasi yang telah dilengkapi dengan SOP yang dipahami dan dijalankan. Faktor pendukung meliputi keberadaan peraturan daerah, dukungan masyarakat dan stakeholder, serta fasilitas pos informasi pengunjung. Sementara itu, faktor penghambat utamanya adalah belum tersedianya pelatihan khusus bagi staf dan rendahnya pemahaman pengunjung terhadap kebijakan retribusi. Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan kebijakan diperkuat melalui peningkatan sarana informasi, penyediaan fasilitas tambahan, pelatihan staf secara berkala, dan sosialisasi menyeluruh mengenai isi SOP kepada petugas agar mampu menyampaikan informasi secara efektif kepada pengunjung.

REFERENSI

Abadie, Alberto, Joshua Angrist, And Guido Imbens. 1999. "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Hafis." 19(11): 1649–54.

- Akib, Haedar. 2012. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1(1): 1. doi:10.26858/jiap.v1i1.289.
- Amiri, Risma Septari, Salmin Dengo, and Very Y Londa. 2020. "Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Administrasi Publik Sam Ratulangi* 4(048): 1–6.
- D, G D Q Ulwhuld, S H Q Dmldqq, D G L Ghdsq, W K H Phulfdq, and Vvrfldwlrq Iru. "No Title." 0.
- "Dermaga Kereng Bangkirai." 2024. atourin. <https://atourin.com/destination/palangkaraya/dermaga-kereng-bangkirai>.
- Entjaurau, Jenifer Aprilia, Ismail Sumampow, and Gustaf Undap. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng." *Jurnal Governance* 1(2): 1–8.
- Indra. 2022. "Pengunjung Meningkatkan, Penerapan Prokes Tetap Dilakukan." PROKALTENG.CO.<https://prokalteng.jawapos.com/humanoria/wisata/11/07/2022/pengunjung-meningkat-penerapan-prokes-tetap-dilakukan/>.
- Iqbal, Muhammad, Isue Anggraeni, and Cantika Dewi. 2022. "Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Periode 2010-2019." *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 13(03): 38–49.
- Isnayati. 2019. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA PANTAI BIRU KABUPATEN BULUKUMBA." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Mais, Rimi Gusliana, and Windi Yuniara. 2020. "Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki

- Jakarta Periode 2015-2019.” Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) 1177: 1–10.
- Mauliddiyah, Nurul L. 2021. “Dampak Pengembangan Desa Wisata Kereng Bangkiri Dalam Kehidupan Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat Lokal.” : 6.
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur. 2019. “Analisis Kebijakan Publik.” *Analisis Kebijakan Publik* (April): 147. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8e_a909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf.
- Pandita, Graha. 2017. “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi).” <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6550/>.
- Pramono, Joko. 2020. Kebijakan Publik Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Rahma, Adenisa Aulia. 2020. “Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia.” *Jurnal Nasional Pariwisata* 12(1): 1. doi:10.22146/jnp.52178.
- Rantung, Margareth Inof Riisyie. 2024. “Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Model).” *Tahta Media Group*: 1–110. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>.
- Rohman Juani. 2021. “Wisata Dermaga Kereng Bangkiri Dan Batu Ampar Kalimantan Tengah.” *kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalangkaraya/baca-artikel/14346/Wisata-Dermaga-Kereng-Bangkiri-dan-Batu-Ampar-Kalimantan-Tengah.html>.
- Sa’adah, Miftahus. 2018. “Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.” : 15.
- Siregar, N P. 2023. “Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 Dalam Rangka Retribusi Izin Usaha Biro Perjalanan Pariwisata Di Kota Padang Sidempuan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan ...* 3(13): 479–88. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/2642>.
- Sudarta. 2022. “Metode Penelitian.” 16(1): 1–23.

- Suta, Putu Wira Parama, and I Gusti Agung Oka Mahagangga. 2018. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Destinasi Pariwisata* 5(1): 144. doi:10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26.
- Tanod, Litha Maria, William A. Areros, and Very Y. Londa. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Objek Pariwisata Alam Pantai Kombi Di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 6(98): 26–41.
- Turhindayani, Turhindayani. 2020. "Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 4(4). doi:10.22146/abis.v4i4.59322.